



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 3 Juni 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021; dan - Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 39 (tiga puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, hari Kamis, 3 Juni 2021, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI, dengan agenda

evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Ketua KPU RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum RI sebesar **Rp2.452.965.805.000,-** (*dua trilyun empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah*).
2. Ketua Bawaslu RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum RI sebesar **Rp1.982.860.804.000,-** (*satu trilyun sembilan ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah*).
3. Ketua KPU RI menyampaikan usulan tambahan anggaran Komisi Pemilihan Umum RI sebesar **Rp10.842.876.876.000,-** (*sepuluh trilyun delapan ratus empat puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
4. Ketua Bawaslu RI menyampaikan usulan tambahan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI sebesar **Rp137.614.099.000,-** (*seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat belas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri dari kekurangan anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp118.636.043.000,- dan kekurangan anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.978.056.000,-, serta tambahan anggaran kegiatan non tahapan sebesar **Rp978.937.909.000,-** (*sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*).
5. Ketua KPU RI menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 KPU RI sebesar Rp719.925.399.736,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp1.919.393.851.000,- atau sebesar 27.51%.
6. Ketua Bawaslu RI menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Bawaslu RI sebesar Rp566.215.758.699,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp1.777.565.817.000,- atau 31.85%.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan

pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebagai berikut:

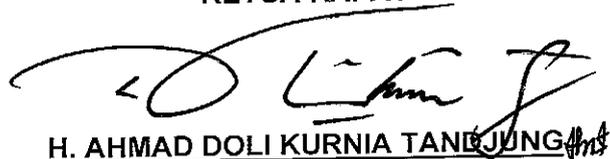
1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum RI sebesar **Rp2.452.965.805.000,-** (*dua trilyun empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah*), dan akan membahasnya secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 selanjutnya.
2. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum RI sebesar **Rp1.982.860.804.000,-** (*satu trilyun sembilan ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah*), dan akan membahasnya secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 selanjutnya.
3. Terhadap usulan tambahan rencana anggaran Tahun 2022 yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum RI sebesar **Rp10.842.876.876.000,-** (*sepuluh trilyun delapan ratus empat puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada Rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
4. Terhadap usulan tambahan anggaran yang disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI sebesar **Rp137.614.099.000,-** (*seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat belas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri dari kekurangan anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp118.636.043.000,- (*seratus delapan belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah*) dan kekurangan anggaran Belanja Operasional Tahun 2022 sebesar Rp18.978.056.000,- (*delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah*), serta tambahan anggaran kegiatan non tahapan sebesar **Rp978.937.909.000,-** (*sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*), Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu RI untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada Rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.

5. Terhadap kebutuhan anggaran terkait Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diajukan oleh KPU RI dan Bawaslu RI, Komisi II DPR RI akan membahas secara mendalam pada Rapat pembahasan selanjutnya.
6. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 sebagai berikut:
 - a. KPU RI sebesar Rp719.925.399.736,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp1.919.393.851.000,- atau sebesar 37.51%.
 - b. Bawaslu RI sebesar Rp566.215.758.699,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp1.777.565.817.000,- atau 31.85%.
7. Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu RI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Selasa, 8 Juni 2021, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 yang akan datang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 3 Juni 2021
KETUA RAPAT


H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNGG
A-270